

BAB I

PENDAHULUAN

A.ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Studi ilmu hubungan internasional selalu mengalami perkembangan dan perubahan sehingga terlalu penting untuk dihiraukan. Tak terkecuali perubahan yang terjadi dalam kasus hubungan antar negara-bangsa turut pula mewarnai perkembangan dan perubahan tersebut. Sebagaimana terjadi dalam kasus perubahan perilaku hubungan negara-negara pecahan Uni Soviet. Maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang konflik antara Georgia dan Rusia.

Rusia sebagai pewaris tunggal USSR mengalami konflik hubungan dengan pecahan USSR sendiri, yaitu Georgia. Hubungan Georgia-Rusia telah penulis amati dari hari kehari semakin memanas, permasalahan tersebut terjadi karena adanya perubahan kebijakan Luar Negeri Georgia sendiri terhadap hubungannya dengan Rusia sebagai implikasi dari perubahan kepemimpinan di Georgia pasca “Revolusi Mawar”. Padahal dalam sejarahnya, hubungan kedua negara ini terjalin sangat harmonis. Akan tetapi setelah revolusi mawar bergulir keharmonisan tersebut berubah menjadi ketegangan, yang kemudian berubah menjadi kontak fisik (senjata) antara Georgia-Rusia yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik secara sepihak yang dilakukan oleh Georgia terhadap Rusia.

Alasan lebih jauh yang mendasari penulis meneliti kasus hubungan kedua negara ini dikarenakan kasus masih sangat tergolong baru dan juga belum ada yang mengangkatnya. Ketersediaan data serta hal-hal pendukung lainnya menguatkan penulis memberanikan diri untuk menulisnya. Oleh karena itu penulis memilih dan mengangkat “Pemutusan Hubungan Diplomatik Georgia terhadap Rusia; study kasus pasca intervensi militer Rusia ke Georgia 2008” sebagai judul skripsi guna melengkapi tugas akhir penulis selaku mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Sepanjang tahun 2008, tidak hanya Irak dan Afghanistan yang berkecamuk. Pecahan Uni Soviet, yaitu Rusia dan negara satelitnya Georgia, juga terlibat peperangan pada Agustus 2008. Perang yang berkecamuk sejak awal Agustus itu, dipicu oleh Ossetia Selatan yang ingin memisahkan diri dari wilayah Georgia. Rencana itu didukung Rusia. Rusia mengakui kedaulatan kedua wilayah tersebut yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia. Pasca pengakuan tersebut, Moskow berjanji akan membuka hubungan diplomatik dengan keduanya.

Georgia yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat melakukan penyerangan ke kantong-kantong kelompok prokemerdekaan di Ossetia Selatan yang dianggap sebagai pemberontak. Serangan itulah yang kemudian

memicu perang terbuka dengan Rusia. Perang pun menjalar ke seluruh wilayah, termasuk Ibu Kota Ossetia Selatan, Tskhinvali.¹

Padahal dalam sejarahnya, Georgia merupakan negara yang berhasil dianeksasi oleh Rusia. Sehingga secara historis kultur yang dimiliki oleh Georgia sebagian besar terpengaruh oleh Rusia. Sejak dianeksasi, negara ini menerapkan sistem politik dan ekonomi sebagaimana yang diterapkan oleh Rusia.

Georgia memiliki luas wilayah yang didominasi oleh pegunungan. Hal tersebut menjadikan Georgia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Tingkat populasinya cukup besar, yaitu sekitar 4.661.473 jiwa. Berdasarkan kekayaan populasi dan sumber daya alam yang dimiliki, membuat Georgia harus memanfaatkan jumlah penduduk tersebut untuk mengolah kekayaannya.

Secara bertahap dan pasti Georgia mampu menghasilkan produk-produk berkualitas ekspor, sebagian besar berasal dari kekayaan buminya. Dengan kualitas ekspor yang dihasilkan, menuntut negara ini untuk menjalin rekan bisnis sebagai pangsa pasar bagi produk-produk dalam negerinya. Maka dari itu, Georgia harus menjalin kerjasama dengan negara lain.

Georgia yang secara historis memiliki ikatan kuat dengan Rusia dan juga secara geografis letak Negara ini berada tepat di beranda Rusia, maka Rusia merupakan prioritas utama bagi Georgia untuk dijadikan pasar bagi produk-produk dalam negerinya. Hal tersebut dikarenakan Rusia adalah negara

¹ “Setidaknya 1600 Warga Sipil Tewas Dalam Perang Rusia-Georgia”, dalam <http://international.okezone.com> , diakses pada 25 April 2009

yang lebih mapan tingkat pertumbuhannya dan juga merupakan negara inti di kawasan Asia Tengah.

Bagi Georgia hubungannya dengan Rusia adalah untuk membantu perekonomian Georgia. Di mana pada masa sebelum Uni Soviet runtuh, Georgia selain mendapatkan bantuan dari IMF dan World Bank, Georgia juga membutuhkan Rusia guna dijadikan pasar dari produk dalam negerinya, seperti Minyak bumi dan Gas, anggur dan lain-lain. Dalam bidang persenjataan militer, Georgia juga mengimpor dari Rusia. Hubungan kedua negara pun terjalin harmonis. Berdasar bukti tersebut membuat Georgia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Rusia.

Hubungan Georgia-Rusia berjalan semakin harmonis ketika Georgia berada di bawah kepemimpinan Eduard Shevardnadze. Kesetiaan Eduard Shevardnadze dikenal oleh Rusia sejak masa Uni Soviet. Ketika itu Shevardnadze adalah Menteri Luar Negeri Uni Soviet. Sehingga Georgia di bawah kepemimpinannya sangat mendukung pelebaran dan perluasan payung sosialis komunis di wilayah Eurasia.

Georgia juga tergabung ke dalam CIS (The Common Wealth of Independence) atau persatuan negara-negara persemakmuran eks-Uni Soviet. Bahkan hubungan Georgia-Rusia diperkuat dengan kesepakatan kedua negara, yang dibuktikan dengan perjanjian 25 tahun dalam hal jual-beli migas. Kesepakatan tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa kedua negara telah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi antar satu sama lain.

Rusia merupakan republik terbesar di Uni Soviet. Area Rusia hampir dua pertiga dari wilayah Uni Soviet. Luas wilayah Rusia juga didukung dengan populasi yang sangat besar yaitu sekitar 150 juta jiwa. Bukti ini menjadikan Rusia memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian Uni Soviet. Populasi yang besar tersebut menjadikan Rusia memiliki keragaman etnis.

Pada tahun 1991 Uni Soviet mengalami keruntuhan. Sehingga mengakibatkan banyak negara-negara yang tergabung di dalamnya memutuskan untuk memerdekakan diri dan menjadi negara yang berdaulat. Setelah Soviet bubar pada 1991, Rusia mewarisi sebagian besar aset milik Soviet. Namun, memburuknya kinerja ekonomi membuat Negeri Beruang Putih itu sedikit demi sedikit terkikis kekuatannya, terutama kekuatan militer yang menjadi andalan mereka dalam mengimbangi Amerika Serikat bersama Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Semakin menuanya peralatan militer dan belum adanya peremajaan secara besar-besaran akibat lesunya ekonomi, membuat kekuatan negara yang wilayahnya berada di dua benua itu-Eropa dan Asia-semakin berkurang.

Seiring dengan itu, beberapa negara yang dulu bersama membangun Uni Soviet, satu demi satu membentuk pemerintahan sendiri. Mereka independen. Sebutlah Ukraina, Kazakhstan, Uzbekistan, Latvia, Estonia, Belarusia, termasuk Georgia dan beberapa negara pecahan Uni Soviet lainnya. Kondisi itu membuat masing-masing negara bekas Soviet memikirkan sendiri

nasib mereka, tak ada lagi ikatan untuk bersama-sama membangun kekuatan seperti di masa lalu.

Meskipun demikian, sebagai pewaris tunggal kekuasaan Uni Soviet, jiwa-jiwa komunisme dan semangat ekspansionis masih melekat sangat kuat pada diri Rusia. Sehingga upaya untuk tetap mempertahankan pengaruhnya kepada negara-negara sekutunya selalu dilakukan oleh Rusia dengan tujuan untuk kepentingan nasionalnya.

Sejauh ini, keinginan Rusia untuk tetap mempertahankan Georgia sebagai salah satu sekutunya masih sangat kuat. Hal ini didasarkan karena letak geografis Georgia berada tepat di muka Rusia. Keinginannya ini semata-mata bertujuan untuk menjadikan Georgia sebagai garda depan pertahanan dan keamanan Rusia.

Akan tetapi keinginan Rusia pupus setelah terjadi revolusi di dalam negeri Georgia yang dikenal dengan Revolusi Mawar. Revolusi ini merupakan sebuah aksi besar-besaran turun ke jalan yang dilakukan oleh masyarakat Georgia di bawah pimpinan Mikhail Saakashvili dengan tujuan untuk menggulingkan rezim yang berkuasa yaitu Eduard Shevardnadze dari tampuk kekuasaannya. Aksi tersebut terjadi karena Pemerintahan Eduard Shevardnadze dinilai sarat dengan tindakan korupsi, dan permasalahan-permasalahan lainnya seperti pengangguran, kemiskinan dan tidak kunjung terselesaikannya permasalahan dua wilayah yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia. Aksi ini berhasil menggulingkan Eduard Shevardnadze tanpa adanya pertumpahan darah, sehingga dikenal dengan sebutan Revolusi Mawar. Melalui revolusi

tersebut, Mikhail Saakashvili menuai pujian dari rakyat Georgia. Revolusi Mawar pula yang mengantarkan Mikhail Saakashvili sampai ketampuk kekuasaan kepresidenan di Georgia setelah memenangkan pemilu pada tahun 2004.

Keberhasilan Mikhail Saakashvili diduga oleh Rusia karena mendapatkan bantuan dan dukungan dari Barat. Hal tersebut jelas membuat kecewa Rusia dan timbul kekhawatiran karena dikhianati oleh teman sendiri. Rusia juga merasa dirugikan karena kejatuhan Eduard Shevardnadze secara tiba-tiba berdampak pada tidak berlanjutnya perjanjian jual-beli migas antara Georgia-Rusia yang telah disepakati selama 25 tahun. Karena Mikhail Saakashvili membawa Georgia berkiblat ke Barat dan anti Rusia.

Tanda-tanda meredupnya kemesraan hubungan Georgia-Rusia mulai tampak ketika Georgia memutuskan untuk keluar dari CIS (The Common Wealth of Independence) atau persatuan negara-negara persemakmuran eks-Uni Soviet. Rupanya perubahan politik di dalam negeri suatu negara akan diikuti pula oleh perubahan kebijakan luar negeri dari negara tersebut.

Georgia yang pada mulanya menganut sistem politik dan ekonomi Rusia, mengalami perubahan di bawah kepemimpinan Mikhail Saakashvili. Georgia di bawah Saakashvili lebih memilih pro ke Barat dan anti-Rusia. Keputusan Georgia untuk keluar dari CIS membuat kecewa Rusia dan meningkatkan keyakinan di pihak Rusia bahwa dirinya telah dikhianati oleh Georgia selaku saudaranya sendiri.

Ketegangan hubungan kedua negara semakin terlihat ketika Georgia pada tahun 2004 mengajukan diri untuk bergabung menjadi anggota NATO dan Uni Eropa. Pengajuan diri Georgia ini disambut baik oleh Amerika Serikat dan beberapa anggota NATO. Sambutan AS ini dinilai Rusia bahwa AS ingin mengisolasi Rusia di wilayah Asia Tengah. Hal yang membuat Rusia berang. Rusia berkepentingan memiliki negara-negara tetangga di sekelilingnya yang bersahabat dan menyesuaikan kebijakannya, ketimbang mempengaruhi kebijakan yang dibuat Rusia.² Hubungan Rusia dengan Georgia pun berubah menjadi “Perang Dingin”. Perang Dingin adalah sebutan bagi sebuah periode di mana terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antara dua blok, yaitu blok barat dengan AS sebagai pucuk pimpinannya dan Blok Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet yang terjadi antara 1947-1991.

Dalam status hubungan Georgia-Rusia, kemarahan Rusia diperlihatkan dengan tindakan spionase yang dilakukan oleh Rusia terhadap Georgia. Rusia juga melancarkan aksi teror dan Embargo terhadap Georgia di bidang transportasi.

Georgia mengajukan Individual Partnership Action Plan (IPAP) kepada NATO untuk menjadi anggota NATO. Sejak itu, AS mengusulkan agar Georgia diterima menjadi anggota NATO secara resmi di tahun 2009 ini. Usulan AS tersebut pada waktu itu ditolak oleh dua negara anggota NATO yaitu Jerman dan Perancis. Kedua negara ini tidak mau berkonflik dan merenggangkan hubungan mereka dengan Rusia, karena notabene Georgia

² “Latar Belakang Perang Georgia – Rusia”, dalam [http://www.daylife.com/ Timpro's weblog/](http://www.daylife.com/Timpro's_weblog/html) html, diakses pada 12 september 2008

masih berada di bawah pengaruh (kekuasaan) Rusia. Namun hal tersebut tidak mengurungkan Georgia untuk tetap mempertahankan keinginannya menjadi anggota NATO. Dengan IPAP yang diajukan oleh Georgia, NATO memasukan Georgia dalam daftar calon anggota NATO. Merasa sudah menjadi calon anggota di NATO, Georgia menunjukkan keseriusannya untuk beraneksasi dengan NATO. Keseriusannya ditunjukkan dengan turut aktifnya militer Georgia terlibat di dalam kegiatan yang dilakukan bersama NATO, yaitu kegiatan di Afghanistan dan misi di Irak.

Keseriusan juga diperlihatkan oleh Georgia dengan melakukan perluasan demokrasi dan perbaikan institusional di dalam negerinya. Hal tersebut dilakukan oleh Georgia sebagai transformasi dari keinginannya untuk beraneksasi dengan NATO. Karena jika Georgia berhasil dalam upayanya tersebut maka Ia layak diterima secara resmi menjadi anggota NATO, sebagaimana prasyarat yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang ingin beraneksasi dengan NATO.

Akan tetapi, upaya perbaikan dan perluasan demokrasi yang dilakukan oleh Georgia terhalangi oleh aksi kelompok separatis dari dua wilayah yang ingin tetap memisahkan diri dari Georgia yaitu Ossetia Selatan. Dalam sejarahnya wilayah ini merupakan sebuah daerah di Kaukasia-yang terdiri atas Ossetia Utara yang berada di Rusia, dan Ossetia Selatan yang berada di Georgia. Pada tahun 1991 Georgia menghapuskan status otonom Ossetia Selatan. Akibat penghapusan otonom tersebut konflikpun segera pecah. Para nasionalis Ossetia Selatan ingin menyatukan daerahnya dengan Ossetia Utara.

Pertempuran meningkat pada 1992 dan timbullah ketegangan antara Rusia dan Georgia. Pada Juni 1992 Eduard Shevardnadze dari Georgia dan Boris Yeltsin dari Rusia setuju membentuk suatu operasi penjaga-keamanan bersama di Ossetia Selatan.³ Rupanya kesepakatan kedua pemimpin tadi cukup berhasil dalam meminimalisir konflik antara Georgia dengan kelompok separatis Ossetia Selatan. Akan tetapi konflik-konflik kecil antara Ossetia Selatan dengan Georgia bertahan sampai periode kedua pemerintahan M. Saakashvili.

Pada tanggal 5 Januari 2008, Mikhail Saakashvili terpilih kembali sebagai Presiden Georgia untuk kedua kalinya. Kemenangan Saakashvili membuat kelompok separatis Ossetia Selatan melancarkan serangannya ke Georgia. Aksi ini mendapat perhatian dari AS. Pada tanggal 10 Juli 2008, Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice bertemu dengan Mikhail Saakashvili di Tbilisi untuk membicarakan permasalahan kedua wilayah tersebut. Dalam pertemuan itu, Menlu AS menyampaikan dukungan terhadap pemerintah Georgia terkait masalah Ossetia Selatan dan Abkhazia.

Pada tanggal 7 Agustus 2008, Georgia melancarkan operasi militer ke Tskhinvali ibu kota Ossetia Selatan sebagai respon atas serangan Ossetia Selatan terhadap desa di Georgia. Operasi ini berjalan selama dua hari, yaitu tanggal 7-8 Agustus 2008. Rupanya Rusia yang bersekutu lama dengan Ossetia Selatan bereaksi keras atas operasi militer Georgia dengan membalas serangan ke Georgia. Konflik pun berubah dari konflik antara Georgia-Ossetia Selatan menjadi konflik antara Georgia-Rusia. Serangan tanpa henti yang dilancarkan

³ Grolier International, "Negara dan Bangsa; Kehidupan Pasca Komunis", 1993, PT Ikrar Mandiriabadi, hlm 77

oleh militer Rusia terhadap militer Georgia dan adanya ketidakseimbangan kekuatan militer yang dimiliki oleh kedua negara mendapat perhatian dari masyarakat internasional. Masyarakat internasional yang diprakarsai oleh Amerika Serikat mendesak Rusia untuk menghentikan tindakan militernya di wilayah Georgia. Diperantarai oleh Perancis, konflik Georgia-Rusia berakhir dengan gencatan senjata.

Setelah terjadi gencatan senjata antar kedua negara, pada tanggal 2 September 2008 Pemerintah Georgia mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Satu hari setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Georgia, Pemerintah Rusia menutup kedutaannya di Tbilisi. Jika melihat sejarah hubungan kedua negara dan juga ketergantungan Georgia yang sangat tinggi kepada Rusia, maka keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik adalah hal yang tidak wajar di era globalisasi. Di mana setiap negara harus menjalin hubungan ataupun kerjasama dengan negara lain (baca; kerjasama antar negara).

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “*Mengapa Georgia memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia paska pendudukan militer yang dilakukan oleh militer Rusia di Georgia (2008)?*”

C. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Teori adalah suatu bentuk penjelasan paling umum memberitahukan mengapa sesuatu bisa terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Selain itu juga digunakan konsep untuk mengorganisasi dan mengidentifikasi fenomena yang menarik perhatian. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep ini secara logis saling berhubungan.⁴

Untuk merumuskan hipotesa sebagai jawaban dari perumusan permasalahan yang telah ditetapkan di atas, pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan teori atau kerangka dasar pemikiran yang berhubungan dengan yang telah ditetapkan, yaitu dengan *konsep Pembuatan keputusan Luar Negeri* sebagai kerangka acuan. Kerangka acuan tersebut menurut hemat penulis dianggap relevan mampu untuk merumuskan hipotesa nantinya.

Dalam studi hubungan internasional, kita mendapati bahwa kajian kebijakan luar negeri sangat luas yang terdiri atas pola-pola yang diwujudkan oleh suatu negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya.

Teorisasi dalam hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri yaitu Graham T. Allison yang mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ada tiga

⁴ Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional ; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm, 185

model yang diajukan oleh Graham T. Allison yaitu *model aktor rasional*, *model proses organisasi* dan *model politik birokratik*. Untuk dapat menjelaskan permasalahan di atas penulis dalam hal ini menggunakan model aktor rasional, atas dasar pertimbangan untuk mempermudah dalam mendeskripsikan proses pembuatan keputusan luar negeri dan fenomena perubahan politik luar negeri suatu Negara.

Model Aktor Rasional

Menurut model ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Di sini pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu--melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh—berusaha menerapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisa model pembuatan keputusan ini menjadi pilihan atau alternatif-alternatif yang dipilih ataupun diambil oleh pemerintah.

Dengan demikian, politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari bangsanya sendiri antara lain adalah dapat menjaga *eksistensi diri*, *kemerdekaan*, *integrasi wilayah*, *keamanan militer* dan *kesejahteraan ekonomi*. Adapun alternatif haluan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah harus diambil atas untung rugi

⁵ Mohtar Masoed, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*., LP3ES Yogyakarta, 1998, hlm 217

masing-masing alternatif tersebut. Jadi, pengambilan keputusan harus menitikberatkan dengan menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”.

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan menetapkan alternatif mana diantara sekian alternatif yang paling banyak mendatangkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu, para pembuat keputusan ini selalu siap untuk melakukan perubahan atau adaptasi dalam kebijakan apapun karena keuntungan yang akan diperoleh lebih besar dari pada seandainya ia tetap mempertahankan kebijakan terdahulu.⁶ Kebijakan masa lalu dapat saja berubah atau permanen tergantung dari besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini adalah prinsip utama dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh aktor rasional. Demikian pula para pembuat keputusan politik luar negeri. Perubahan sikap atau memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara lain selalu didasari pertimbangan optimalisasi hasil atau keuntungan, bukan kerugian.

Proses intelektual pengambilan keputusan luar negeri melalui empat tahap yaitu *penetapan situasi, pemilihan tujuan, pencarian alternatif dan terakhir pemilihan alternatif*. Pada tahap pertama, seorang pengambil keputusan harus mendapatkan atau memiliki informasi sebanyak mungkin untuk menetapkan situasi dan kondisi. Ikut campurnya Rusia dalam konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan pada tahun 2008 telah membuat pemerintah Georgia bereaksi dengan melakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Rusia sebagai bentuk balasan pemerintah Georgia

⁶ *Ibid*

terhadap serangan militer yang dilakukan oleh Rusia. Georgia dalam mengambil kebijakan luar negeri mempertimbangkan kondisi politik luar negeri yang tidak kondusif dikarenakan pertikaianya dengan Ossetia Selatan yang kemudian mendapat serangan militer Rusia yang tanpa diduga sama sekali oleh pihak Georgia. Oleh karena itu Georgia membutuhkan Negara lain selain Rusia yang kuat untuk menopang ataupun membentengi Georgia dari bahaya yang ada, yakni pemenuhan dari segi keamanan.

Tahap kedua dari proses intelektual adalah memilih tujuan. Sehingga Georgia di bawah kekuasaan Mikhail Saakashvili berinisiatif untuk memanfaatkan keadaan yang ada untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia, walaupun telah lama kedua Negara menjalin hubungan diplomatik di masa pemerintahan Eduard Shevardnadze. Perubahan sikap ataupun tindakan yang diambil tersebut demi untuk mewujudkan keinginan dari Georgia dalam status keanggotaannya di NATO dan hubungannya dengan Barat, jika dibandingkan dengan masih tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia. Sehingga pencapaian keuntungan untuk Georgia secara optimal merupakan prioritas utama pasca serangan militer Rusia ke Georgia.

Tahap ketiga yaitu pencarian alternatif. Dalam tahap ini Georgia sebagai aktor rasional akan mencari alternatif-alternatif sebanyak mungkin untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan luar negeri. Walaupun pada akhirnya hanya satu alternatif saja yang dipilih oleh aktor rasional yang dinilai paling banyak menghasilkan keuntungan. Adapun

alternatif-alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan Georgia sebagai aktor rasional dalam mengambil keputusan luar negeri terhadap hubungannya dengan Rusia pasca konflik 2008 antara Georgia-Ossetia Selatan sebagai akibat serangan militer Rusia ke wilayah Georgia, pemerintah Georgia di bawah Mikhail Saakashvili sebagai aktor rasional lebih memilih untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik antar kedua Negara. Keuntungan yang diperoleh antara lain yaitu adanya dukungan dari Barat yakni Amerika Serikat dan sekutunya, perlindungan ekonomi dan keamanan dari Barat dan NATO. Kemungkinan pembentukan aliansi antara Georgia dengan Barat dimasa yang akan datang.

Tabel 1.1.

**ALTERNATIF-ALTERNATIF PEMBUATAN KEPUTUSAN
LUAR NEGERI GEORGIA TERHADAP RUSIA**

Alternatif	Keuntungan	Kerugian
Alternatif 1 (Georgia tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaminnya volume perdagangan kedua Negara. • Tetap terjalannya perjanjian 25 tahun jual beli migas antar kedua Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terancamnya eksistensi Georgia di sebagai negara berdaulat. • Tetap kehilangan dua daerah yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia yang selama ini

		<p>diperjuangkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya status keanggotaan Georgia di NATO akibat berada di bawah bayang-bayang Rusia.
<p>Alternatif 2 (Georgia memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Amerika Serikat dan Jerman atas keanggotaan Georgia di NATO.. • Semakin terbuka lebar akses bagi Georgia untuk segera menjadi anggota NATO secara resmi. • Negara-negara Barat semakin meningkatkan kerjasama (diplomati, politik, maupun ekonomi) dengan Georgia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin berani Rusia melakukan penyerangan terhadap Georgia. • Terputusnya perjanjian 25 tahun dalam jual-beli gas antara kedua Negara. • Kemungkinan terjadi konflik energi antar kedua negara.

Tahap terakhir dari proses pengambilan kebijakan luar negeri adalah pemilihan alternatif. Dalam proses ini Georgia akan memilih alternatif terbaik bagi Georgia dari alternatif-alternatif yang ada. Pemilihan alternatif ini

tentunya menuntut kemampuan intelektual aktor rasional di dalam memutuskan alternatif mana yang dipilih sebagai kebijakan luar negeri yang dinilai dapat memberikan keuntungan. Dari alternatif yang ada, Georgia di bawah pemerintahan Mikhail Saakashvili cenderung akan lebih memilih alternatif yang menguntungkan sebagai kebijakan luar negerinya, yaitu memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Rusia dinilai bahwa serangan militer Rusia ke Georgia telah mengancam keamanan nasional Georgia serta sebagai alternatif untuk mempercepat status keanggotaan Georgia di NATO, jika dibandingkan dengan masih tetap mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Rusia.

E. HIPOTESA

Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan oleh Georgia terhadap Rusia pasca pendudukan yang dilakukan oleh militer Rusia di wilayah Georgia dikarenakan;

1. Merupakan keputusan rasional dari pemerintah Georgia yang menilai bahwa serangan militer Rusia telah mengancam keamanan nasional Georgia, dan
2. Demi untuk mengejar kepentingan nasionalnya yaitu sebagai alternatif dalam mempercepat status keanggotaannya di NATO, jika dibandingkan dengan masih tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia.

F. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penelitian maupun penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan dikeluarkannya keputusan dari Georgia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia paska pendudukan militer Rusia di wilayah Georgia, yang dalam konteks penelitian ini mengacu kepada baik faktor internal maupun eksternal.
2. Merupakan usaha perluasan dan pendalaman pengetahuan penulis tentang metodologi ilmu hubungan internasional beserta teori-teorinya pada umumnya dan berkaitan dengan konflik Georgia-Rusia pada khususnya.
3. Untuk melengkapi tugas akhir penulis sekaligus sebagai bentuk penerapan dan pengujian teori-teori yang pernah diterima penulis pada masa perkuliahan masih aktif.
4. Serta ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademis yang dibebankan kepada penulis pada jenjang studi Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2008-2009.

G. METODE PENULISAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan gaya kualitatif yaitu dengan logika deduktif. Yang memiliki tujuan umum dalam hal ini adalah untuk menjelaskan (eksplanasi), yaitu hubungan antara 2 negara—Georgia dan Rusia—dengan berpedoman pada rujukan data-data ilmiah (data sekunder).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka (library research), di mana data-data tadi diseleksi dan diolah dengan seksama menggunakan teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan tingkat analisisnya yaitu tingkat korelasional.

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian yang ditekankan di dalam penelitian ini menekankan pada penggunaan batasan negara bangsa dan waktu. Batasan negara yaitu Georgia dan Rusia. Sedangkan dalam batasan waktu yaitu peristiwa yang terjadi setelah terpilihnya Mikhail Saakashvili menjadi Presiden Georgia pada tahun 2004 sampai dengan sekarang, akan tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan data rujukan di luar waktu tersebut jika dianggap masih relevan dengan topik penelitian.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Setelah penelitian selesai dilakukan, laporan didokumentasikan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah terdiri dari lima bab pembahasan yang terdiri dari sub-pokok bahasan dalam tiap-tiap babnya.

BAB I Merupakan gambaran mengenai maksud, tujuan dan hasil yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini. Bab ini memuat Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Penelitian, Pokok Permasalahan

Penelitian, Kerangka Teoritik/Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan/Pembahasan.

- BAB II Merupakan bab yang membahas secara umum gambaran kedua negara serta sejarah dinamika hubungan kedua negara.
- BAB III Bab yang membahas Ketegangan Hubungan kedua Negara.
- BAB IV Bab yang membahas alasan pendorong dikeluarkannya kebijakan pemutusan hubungan diplomatik—keputusan rasional dan kepentingan nasional—oleh Georgia terhadap Rusia sebagai pembuktian kebenaran hipotesa yang telah ditetapkan.
- BAB V Merupakan kesimpulan dari penelitian/penulisan ini.